

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagai ibu kota lama yang memiliki sejarah dan infrastruktur penting, Jakarta tetap menjadi fokus dalam dinamika politik dan kebijakan nasional. Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) kemudian muncul sebagai instrumen hukum untuk mengatur peran Jakarta, termasuk dalam konteks legislatif sebagai Ibu Kota Legislatif. Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi topik penting dalam agenda legislatif pasca-penyahutan RUU IKN. Salah satu usulan yang mencuat adalah Jakarta tetap memegang peran sebagai Ibu Kota Legislatif. Fraksi PKS mengusulkan hal ini dengan mengacu pada sejumlah alasan, seperti sejarah, akses transportasi yang baik, mobilitas masyarakat, dan efektivitas Komplek Senayan sebagai pusat legislatif. Dalam konteks ini, pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) melibatkan berbagai pihak, termasuk DPR dari Fraksi PKS yang telah di sebutkan tadi, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah Jakarta<sup>1</sup>. Koordinasi yang baik diperlukan untuk memastikan peran Jakarta yang optimal sesuai dengan perubahandinamika politik dan pemindahan Ibu Kota Negara. Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi inisiatif dari berbagai pihak, DPR Fraksi PKS sebagai lembaga legislatif yang bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang juga melibatkan pemerintah pusat, terutama dalam hal koordinasi dengan pemerintah daerah Jakarta. Berbagai pertimbangan politik, strategis, dan kepentingan nasional dan daerah perlu dipertimbangkan secara cermat dalam penyusunan Rancangan Daerah Khusus Jakarta untuk mencapai kesepakatan yang menyeluruh dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

---

<sup>1</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2024, Rapat Paripurna DPR RI Sahkan UU Daerah Khusus Jakarta, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/49066/t/Rapat%20Paripurna%20DPR%20RI%20Sahkan%20UU%20Daerah%20Khusus%20Jakarta> diakses pada 2 April 2024 Pukul 12.35 WIB.

Dari perubahan ini, muncul kebutuhan untuk mengatur ulang peran dan status Jakarta. RUU IKN yang disusun sebagai respons terhadap keputusan strategis bertujuan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Penetapan Kalimantan sebagai ibu kota baru bertujuan untuk mengurangi beban Jakarta yang terlalu padat, mendukung pembangunan di luar Pulau Jawa, serta meningkatkan keterpaduan dan keseimbangan pembangunan nasional.<sup>2</sup> Keputusan ini juga sejalan dengan visi pembangunan yang lebih merata dan inklusif di seluruh Indonesia. RUU IKN melibatkan proses legislasi yang mendalam di DPR, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah terkait. Berbagai pertimbangan strategis, ekonomi, dan sosial-politik menjadi dasar dalam penyusunan RUU tersebut.

Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi Indonesia, menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam pengelolaan tata ruang, infrastruktur, dan pelayanan publik. Pertumbuhan populasi yang cepat, urbanisasi yang terus berlangsung, mobilitas yang tinggi, serta masalah lingkungan dan sosial ekonomi menjadi fokus utama dalam pengembangan kota ini. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, konsep Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi relevan sebagai upaya memberikan fleksibilitas dan keistimewaan dalam tata kelola wilayah Jakarta. Pembentukan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta di DPR 2023-2024 merupakan hasil dari konsensus politik antara berbagai fraksi dan kepentingan politik, yang bertujuan mencapai kesepakatan dalam merumuskan regulasi yang dapat memberikan solusi bagi beragam tantangan yang dihadapi Jakarta. Selain itu, peran pemerintah dalam mengajukan usulan penyempurnaan dan memastikan keberlanjutan regulasi sangat penting untuk mendukung pertumbuhan Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi yang modern, efisien, dan berkelanjutan.

Pada Rapat Paripurna DPR RI Ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024, Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) secara resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU) DKJ. Hal ini merupakan langkah

---

<sup>2</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html> diakses pada 2 April 2024 pukul 14.13 WIB.

penting dalam pengembangan Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi. Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta mengalami pembahasan yang mendalam di DPR RI, dimana 8 dari 9 Fraksi yang ada telah menyetujui Rancang Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta untuk diteruskan ke tahap Pembicaraan Tingkat II. Meskipun ada satu Fraksi yang menolak, namun mayoritas menyetujui langkah tersebut. Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta yang disahkan terdiri dari 12 bab dan 73 pasal, mencakup berbagai aspek penting seperti definisi "Kawasan Aglomerasi," ketentuan mengenai penunjukan Ketua dan anggota Dewan Aglomerasi oleh Presiden, serta mekanisme pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Selain itu, terdapat usulan penyempurnaan terhadap ketentuan-ketentuan tertentu sesuai dengan ajukan Pemerintah. Usulan penyempurnaan tersebut mencakup perbaikan definisi akses terhadap data kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan jalan berbayar elektronik dan penghapusan rumusan terkait penyidikan atas pelanggaran lalu lintas di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap kendaraan bermotor tertentu. Dengan disahkannya RUU DKJ menjadi Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ), diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengembangkan Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi yang efisien dan berkelanjutan.

Dinamika pengesahan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta yang menjadi usul inisiatif DPR. Pertama-tama, keputusan yang diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini menunjukkan adanya kesepakatan mayoritas, dengan delapan fraksi yang menyetujui RUU DKJ untuk disahkan menjadi usul inisiatif DPR. Namun, penolakan dari Fraksi PKS mengindikasikan adanya perbedaan pandangan yang mungkin muncul dalam dinamika partai politik. Dinamika partai politik dalam proses pembahasan RUU DKJ ini terlihat dari berbagai catatan yang disampaikan Fraksi PKS, seperti terkesan terburu-buru dan rendahnya partisipasi publik dalam pembahasan Rancang Undang-Undang tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa dalam proses legislasi, berbagai pandangan dan kepentingan dari berbagai fraksi politik harus diakomodasi dan dipertimbangkan dengan baik untuk mencapai konsensus yang lebih luas.

Selain itu, perbedaan pendapat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta juga menggambarkan dinamika demokrasi yang aktif dalam tubuh DPR RI. Diskusi, debat, dan negosiasi antara fraksi politik mencerminkan proses demokratis yang berjalan dalam menetapkan kebijakan publik yang berkaitan dengan pembangunan Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi yang efisien. Dengan demikian signifikan dinamika pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta sangatlah penting, karena hal ini mencerminkan pluralitas pandangan dan kepentingan yang harus diakomodasi dalam proses legislasi. Kesepakatan dan kompromi antarfraksi politik menjadi kunci untuk menciptakan regulasi yang lebih komprehensif, relevan, dan berdaya guna bagi masyarakat Jakarta dan Indonesia pada umumnya.

Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta disahkan pada 28 Maret 2024 setelah melalui proses panjang. Pengesahan Rancangan Undang-Undang ini merupakan tonggak sejarah penting bagi Jakarta, karena memberikan status khusus sebagai Ibu Kota Jakarta Negara Republik Indonesia. Hal ini membawa konsekuensi dan peluang baru bagi pembangunan dan tata kelola kota Jakarta. Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta memberikan kewenangan khusus kepada pemerintah daerah Jakarta untuk mengatur dan mengelola berbagai aspek kehidupan di Jakarta, Jakarta menghadapi berbagai kompleksitas dan tantangan pembangunan kota, seperti kemacetan lalu lintas, banjir, polusi, dan kesenjangan sosial. Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut.

Peluang yang diharapkan dari pemerintahan dengan kewenangan yang lebih luas, pemerintah daerah Jakarta diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas pemerintahan dalam melayani masyarakat. Memperhatikan pembangunan kota, Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta diharapkan dapat memperhatikan pembangunan Kota Jakarta, sehingga menjadi kota yang lebih modern, maju, dan berkelanjutan, dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tata kelola yang lebih baik dan pembangunan yang lebih cepat, diharapkan kesejahteraan masyarakat Jakarta akan meningkat. Di sisi lain, Perpindahan Ibu Kota

Negara merupakan keputusan strategis yang melibatkan berbagai pertimbangan politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Beberapa negara telah melakukan langkah ini dengan berbagai alasan dan urgensi yang berbeda.

Brasil memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasília pada tahun 1960. Keputusan ini didorong oleh keinginan untuk mendorong pembangunan di wilayah tengah Brasil yang kurang berkembang, serta mengurangi kemacetan dan overpopulasi di Rio de Janeiro. Brasília dipilih sebagai lokasi baru karena posisinya yang lebih sentral dan potensinya untuk merangsang pembangunan nasional. Menurut penelitian oleh Fearnside (1986)<sup>3</sup>, perpindahan ini juga bertujuan untuk menyebarkan populasi dan mengembangkan wilayah pedalaman yang sebelumnya kurang berkembang. Selain itu, perpindahan ini diharapkan dapat mengurangi tekanan urban di Rio de Janeiro dan Sao Paulo, serta mendorong integrasi nasional dengan menciptakan pusat pemerintahan yang lebih terpusat. Perpindahan ibu kota ke Brasília membawa perubahan signifikan dalam distribusi populasi dan pembangunan ekonomi. Brasília berkembang pesat sebagai pusat administrasi dan politik, namun juga menghadapi tantangan seperti ketimpangan ekonomi dan masalah lingkungan.

Pada tahun 2005, Myanmar memindahkan ibu kotanya dari Yangon ke Naypyidaw. Perpindahan ini cukup mengejutkan dan dilakukan dengan cepat serta tanpa banyak pemberitahuan sebelumnya. Lokasi Naypyidaw dipilih karena letaknya yang lebih strategis dari segi keamanan dan kontrol politik. Menurut laporan oleh Seekins (2009), alasan utama perpindahan adalah strategi politik dan keamanan. Lokasi Naypyidaw yang lebih terpencil dipilih untuk mengurangi risiko invasi dan memberikan pemerintah pusat kontrol lebih besar terhadap wilayahnya. Selain itu, perpindahan ini juga dilihat sebagai upaya untuk memodernisasi administrasi pemerintahan dan mengembangkan infrastruktur baru di kawasan tersebut. Naypyidaw kini menjadi pusat administrasi yang modern dengan infrastruktur yang baik, namun perpindahan ini juga menghadapi kritik terkait

---

<sup>3</sup> <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/perpindahan-ibu-kota-negara-ikn-belajar-dari-brasil> diakses pada 4 April 2024 Pukul 11.15 WIB.

kurangnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Dampak sosial dan ekonomi terhadap Yangon dan Naypyidaw juga masih menjadi bahan diskusi.

Kazakhstan memindahkan ibu kotanya dari Almaty ke Astana (sekarang Nur-Sultan) pada tahun 1997. Keputusan ini diambil oleh Presiden Nursultan Nazarbayev dengan berbagai pertimbangan strategis. Menurut penelitian oleh Oka (2006), alasan utama perpindahan adalah posisi geografis yang lebih sentral dan untuk menghindari risiko seismik yang tinggi di Almaty. Perpindahan ini juga didorong oleh keinginan untuk mendiversifikasi ekonomi dan memperkuat kontrol atas wilayah utara yang berdekatan dengan Rusia. Astana berkembang menjadi pusat ekonomi dan politik yang modern dengan infrastruktur yang canggih. Namun, perpindahan ini juga memunculkan tantangan baru seperti kebutuhan investasi yang besar dan dampak sosial terhadap penduduk Almaty yang tetap menjadi pusat ekonomi utama Kazakhstan.

Mesir telah mengumumkan rencana untuk memindahkan ibu kotanya dari Kairo ke kota baru di dekat Terusan Suez. Keputusan ini diambil sebagai respon terhadap berbagai masalah yang dihadapi Kairo, termasuk kemacetan, polusi, dan kepadatan penduduk yang tinggi. Studi oleh Attia (2018) mengidentifikasi bahwa perpindahan ini bertujuan untuk mengatasi kemacetan dan polusi di Kairo, serta untuk menarik investasi asing dan menciptakan pusat ekonomi baru. Kota baru ini diharapkan dapat menyediakan lingkungan yang lebih layak huni dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pengembangan kota baru ini diharapkan dapat mengurangi tekanan pada Kairo dan menciptakan peluang ekonomi baru. Namun, ada tantangan besar terkait pendanaan, implementasi, dan dampak sosial terhadap penduduk Kairo dan daerah sekitarnya.

Indonesia merencanakan perpindahan ibu kotanya dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Jakarta menghadapi berbagai masalah serius termasuk kemacetan, banjir, dan penurunan tanah yang signifikan. Menurut penelitian oleh Sudibyo (2019) dan Ward et al. (2011), perpindahan ini didorong oleh kebutuhan untuk mengatasi kemacetan dan penurunan tanah di Jakarta. Selain itu, perpindahan ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan regional antara

Jawa dan pulau-pulau lainnya. Rencana pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur mencakup berbagai aspek termasuk infrastruktur modern, lingkungan yang berkelanjutan, dan pusat pemerintahan yang efisien. Penelitian oleh Hadi (2020) menyoroti bahwa perpindahan ini dapat menjadi katalisator untuk pembangunan wilayah timur Indonesia dan meningkatkan integrasi nasional.

Dalam membandingkan alasan dan urgensi perpindahan ibu kota di Brasil, Myanmar, Kazakhstan, Mesir, dan Indonesia, terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan yang menarik. Semua negara menghadapi tantangan urban seperti kemacetan dan kepadatan penduduk, serta keinginan untuk pemerataan pembangunan. Namun, Indonesia menghadapi tambahan tantangan lingkungan seperti banjir dan penurunan tanah yang membuat perpindahan ini lebih mendesak.

Dampak perpindahan ibu kota di negara-negara tersebut menunjukkan berbagai hasil. Di Brasil, perpindahan berhasil mendorong pembangunan di wilayah tengah, namun juga menciptakan ketimpangan baru. Di Myanmar, perpindahan meningkatkan kontrol pemerintah namun menghadapi kritik terkait kurangnya partisipasi publik. Kazakhstan berhasil mengembangkan Astana sebagai pusat baru, namun masih menghadapi tantangan ekonomi. Mesir berharap untuk mengatasi masalah urban Kairo dengan kota baru, namun prosesnya masih dalam tahap awal. Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara lain mengenai pentingnya perencanaan yang matang, partisipasi publik, dan pengelolaan dampak sosial dan ekonomi. Rencana yang jelas dan transparan serta dukungan dari masyarakat dan pemangku kepentingan sangat penting untuk keberhasilan proyek ini. Perpindahan ibu kota adalah keputusan strategis yang kompleks dan melibatkan berbagai pertimbangan. Di Indonesia, urgensi perpindahan ini didorong oleh kombinasi faktor lingkungan, ekonomi, dan sosial. Studi kasus dari negara-negara lain menunjukkan bahwa perpindahan ibu kota sering kali menjadi alat strategis untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas. Oleh karena itu, keputusan ini harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan komitmen untuk memastikan keberhasilan jangka panjang.

Perpindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur adalah langkah besar yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi berbagai

masalah yang dihadapi ibu kota saat ini. Keputusan ini didasarkan pada sejumlah faktor termasuk kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, penurunan tanah, banjir, serta upaya pemerataan pembangunan dan pengurangan ketimpangan regional. Nampaknya, dalam rapat pembahasan RUU DKJ ini masih terdapat kepentingan politik, baik dari pemerintah maupun fraksi-fraksi di DPR. Kerjasama partai politik dalam fraksi tersebut, memberikan sinyal bahwa dalam pembahasan RUU DKJ yang terkesan cepat, tanpa melihat unsur-unsur atau masukan lain dari organisasi atau masyarakat sipil, secara subjektif memberikan asumsi bahwa masih adanya cacat prosedural, bahkan hal inilah yang telah disampaikan oleh fraksi PKS yang menolak RUU DKJ tersebut.

Maka dari itu, dalam fenomena dan dinamika yang terjadi ini, penulis ingin meneliti sejauh mana dinamika pembahasan RUU DKJ di Dewan Perwakilan Rakyat, yang dalam hal ini pembahasannya pun tetap melibatkan eksekutif, yaitu Kementerian Dalam Negeri. Dalam penelitian ini yang berangkat masalah dan dinamika yang telah terjadi dalam pembahasan RUU DKJ, maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti bagaimana dinamika yang terjadi di DPR dalam pembahasan RUU DKJ, dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepentingan dan kerjasama fraksi DPR dalam pembahasan RUU DKJ.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dinamika dan proses penyusunan pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) di Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2023-2024 ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) di Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2023-2024 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Akademis**

1. Menganalisis proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-



Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) terhadap berbagai aspek kehidupan di Jakarta, termasuk aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

2. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika Partai Politik dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) di DPR 2023-2024.

### 1.3.2 Tujuan Praktis

1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta(DKJ).
2. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam menilai kinerja Fraksi-Fraksi DPR dalam proses legislasi.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Akademis

- 1) Memperoleh hasil penelitian yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu politik, khususnya dalam proses pembahasan RUU di Dewan Perwakilan Rakyat yang hingga saat ini masih adanya pergeseran orientasi dan kepentingan.
- 2) Memperoleh hasil penelitian yang memberikan informasi kepada publik mengenai dinamika pembahasan RUU DKJ.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kepentingan akademik dan sebagai bahan yang menjadi referensi kedepan pada penelitian yang sama yang berkaitan dengan bagaimana Dinamika Pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) di DPR tahun 2023-2024 dan dapat memahami apa saja faktor- faktor yang mempengaruhi Partai politik dalam konteks Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta(DKJ), juga bagi penelitian ini bermanfaat tentunya dalam pemenuhan salah satu syarat menjadi Sarjana di Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis akan membaginya ke dalam 5 BAB yang saling berkaitan dan diuraikan secara sistematis, sistematika penulisannya sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pembuka yang akan menguraikan pembahasan skripsi yang mencakup: latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian yang selanjutnya sebagai bahan awal dengan menampilkan data primer yang didapati penulis dan dilakukan analisis terhadap data tersebut untuk mendapatkan rumusan masalah dalam penelitian.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan sebagai alat dalam menganalisa. Penelitian ini menganalisis bagaimana pola partai politik yang terjadi selama cabinet pemerintahan Joko Widodo pada tahun 2014 dan juga pada bab ini akan menguraikan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh orang lain dan apa yang akan dilakukan oleh peneliti agar terlihat apa yang membedakan dengan penelitian yang sudah ada. Ada pun konsep dan teori yang digunakan yaitu berhubungan dengan Politik, strategi politik serta



konsep-konsep lainnya yang masih berhubungan.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan secara singkat mengenai metode yang digunakan dengan memakai metode pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dan untuk pengumpulan data dilakukan dengan cara yaitu wawancara dan studi kepustakaan, teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, dan analisis data.

### BAB IV GAMBARAN UMUM

Gambaran umum mengenai dasar-dasar yang menjelaskan mengapa perlu pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Kalimantan.

### BAB V PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan beberapa sub-bab yang mana peneliti akan menguraikan jawaban dan penjelasan mengenai rumusan masalah yang telah disusun.

### BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini akan menguraikan kesimpulan penelitian.

